

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Definisi *Corporate Social Responsibility (CSR)* memiliki banyak penafsiran dari berbagai sudut pandang keilmuan ekonomi, sosial, *Public Relations*, agama, lingkungan dan sebagainya. *The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)* menyebutkan bahwa *Corporate Social Responsibility* merupakan komitmen suatu bisnis atau perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sambil meningkatkan kualitas hidup karyawan beserta keluarganya, komunitas lokalnya, dan masyarakat lainnya. *European Union* memberikan definisi *Corporate Social Responsibility* yaitu sebuah konsep dengan mana perusahaan mengintegrasikan perhatian terhadap sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan (Rochmaniah & Sinduwiatmo, 2020).

Kotler & Lee mendefinisikan *Corporate Social Responsibility* sebagai komitmen korporasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui kebijakan praktik bisnis dan pemberian kontribusi sumber daya korporasi. Michael Hopkins, menyatakan *Corporate Social Responsibility* berkaitan dengan perlakuan perusahaan terhadap *stakeholders* baik yang berada didalam maupun diluar perusahaan, termasuk lingkungan, secara etis atau bertanggungjawab dengan memperlakukan *stakeholders* dengan cara yang bisa diterimanya. *Corporate Social Responsibility* merupakan cakupan dari pelaksanaan untuk meningkatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Rochmaniah & Sinduwiatmo, 2020).

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan konsep yang menegaskan bahwa perusahaan tidak lagi hanya bertanggung jawab terhadap kinerja ekonomi atau pencapaian nilai perusahaan semata, melainkan juga wajib memperhatikan aspek sosial serta lingkungan. Dengan demikian, orientasi perusahaan bergeser dari *single bottom line* menjadi *triple bottom line* (Wati, 2019).

Konsep *Triple Bottom Line* awalnya diperkenalkan oleh *World Commission On Environment and Development (WCED)* melalui gagasan mengenai pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial, kemudian dikembangkan lebih jauh oleh John Elkington. Menurut Elkington, agar perusahaan dapat bertahan dalam jangka panjang, maka fokus organisasi tidak hanya pada keuntungan, tetapi juga pada aspek sosial dan kelestarian lingkungan. Tiga elemen ini dikenal dengan istilah 3P, yaitu *profit*, *people*, dan *planet* (Wati, 2019).

Profit dalam konteks *Triple Bottom Line* dipahami sebagai hasil ekonomi yang diperoleh perusahaan, namun pencapaian keuntungan tidak dapat dilakukan dengan mengabaikan dampak produksinya terhadap lingkungan, sehingga perusahaan dituntut menerapkan praktik bisnis yang adil dan beretika. Keuntungan tetap menjadi fondasi keberlanjutan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang saham, karyawan, pemerintah, dan masyarakat, sekaligus menjadi dasar bahwa *Corporate Social Responsibility* merupakan investasi jangka panjang yang perlu dijalankan secara berkelanjutan demi membangun citra positif perusahaan. Selain itu, aspek *people* menegaskan bahwa masyarakat adalah pihak yang terdampak langsung dari kegiatan perusahaan, sehingga perusahaan perlu memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat melalui bantuan, pemberdayaan, pelatihan, hingga penyediaan fasilitas sosial. Sementara itu, *planet* berkaitan dengan perlindungan sumber daya alam yang seringkali menjadi pihak paling terdampak dari aktivitas produksi, sehingga perusahaan wajib melakukan pelestarian melalui pengelolaan limbah, penanaman pohon, dan pengurangan polusi sebagai bentuk tanggung jawab lingkungan sekaligus strategi keberlanjutan perusahaan di masa mendatang (Wati, 2019).

Bila dikaitkan dengan keuntungan kompetitif dari suatu perusahaan, manfaat *Corporate Social Responsibility* dapat dibagi dalam 2 yaitu internal dan eksternal. Penerapan *Corporate Social Responsibility* memberikan manfaat internal bagi perusahaan, antara lain meningkatkan kompetensi dan loyalitas pegawai melalui program pelatihan, mendorong kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sehingga memperbaiki hubungan dengan pemasok, serta memperkuat budaya organisasi dan koordinasi antar fungsi. Selain itu, pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* juga

berdampak positif pada peningkatan kinerja keuangan dan kemampuan perusahaan dalam memperoleh modal (Wati, 2019).

Penerapan *Corporate Social Responsibility* dapat meningkatkan citra perusahaan sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab sosial serta memperkuat layanan perusahaan terhadap pihak eksternal. *Corporate Social Responsibility* juga menjadi pembeda produk yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki perhatian terhadap lingkungan sesuai karakteristik bisnisnya. Melalui *Corporate Social Responsibility*, hubungan komunikasi dengan masyarakat semakin baik sehingga memperkuat dukungan publik dan keterikatan komunitas terhadap perusahaan. Selain itu, *Corporate Social Responsibility* memberi kontribusi bagi kinerja perusahaan dengan membuka peluang penghargaan serta membantu melindungi perusahaan dari berbagai risiko reputasi di masa depan (Rochmaniah & Sinduwiatmo, 2020).

Efektivitas pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di Indonesia dapat dilihat melalui empat model utama. Pertama, keterlibatan langsung, yaitu perusahaan menjalankan kegiatan sosial sendiri dengan memberikan bantuan atau program langsung kepada masyarakat tanpa perantara. Kedua, melalui yayasan perusahaan, yakni perusahaan membentuk lembaga sosial resmi seperti yayasan untuk mengelola dana dan kegiatan *Corporate Social Responsibility* secara lebih terencana dan berkelanjutan. Ketiga, kemitraan dengan pihak lain, yaitu perusahaan bekerja sama dengan lembaga pemerintah, *NGO*, universitas, atau media dalam pendanaan dan pelaksanaan program. Keempat, bergabung dalam konsorsium, yaitu perusahaan menjadi bagian dari lembaga sosial bersama beberapa perusahaan lain untuk menyelenggarakan program sosial tertentu, biasanya dalam bentuk pemberian hibah pembangunan (Rochmaniah & Sinduwiatmo, 2020).

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering juga disebut sebagai *social disclosure*, *corporate social reporting*, *social accounting* atau *Corporate Social Responsibility*

merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut memperluas tanggung jawab organisasi (khususnya perusahaan), di luar peran tradisional untuk menyediakan laporan keuangan kepada pemilik modal, khususnya pemegang saham. Perluasan tersebut

dibuat dengan asumsi bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab yang lebih luas dibanding hanya mencari laba untuk pemegang (Wati, 2019).

Corporate Social Responsibility berperan sebagai strategi perusahaan dalam membangun keunggulan kompetitif melalui peningkatan citra dan reputasi yang sulit ditiru oleh pesaing. Standar utama yang banyak dijadikan acuan dalam pengungkapan *Corporate Social Responsibility* adalah *Global Reporting Initiative (GRI)*, yaitu pedoman internasional untuk pelaporan keberlanjutan yang digunakan secara luas di berbagai negara. Dalam pengukuran luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, penilaian dilakukan berdasarkan item-item indikator yang tercantum dalam panduan *GRI* dengan tiga komponen utama, yaitu (Wati, 2019) :

- a) Ekonomi, yaitu indikator mengenai dampak kegiatan perusahaan terhadap perekonomian, termasuk aliran manfaat ekonomi bagi pemangku kepentingan dan kontribusi ekonomi yang diberikan organisasi.
- b) Lingkungan, mencakup dampak kegiatan produksi terhadap ekosistem seperti penggunaan energi, pengelolaan limbah, emisi, serta upaya menjaga kelestarian sumber daya alam.
- c) Sosial, meliputi pengaruh perusahaan terhadap aspek sosial seperti praktik ketenagakerjaan, penghormatan HAM, hubungan masyarakat, serta kualitas produk dan layanan yang diberikan.

Tabel 2. 1 Indikator-indikator GRI-G4

Kategori Ekonomi		
Kinerja Ekonomi	EC1	Nilai Ekonomi yang Langsung dihasilkan
	EC2	Implikasi finansial dan resiko serta peluang akibat perubahan iklim
	EC3	Cakupan kewajiban organisasi atas program imbalan (<i>defined benefit plan</i>)
	EC4	Bantuan finansial yang diterima dari Pemerintah
Keberadaan Pasar	EC5	Rasio upah standar pegawai pemula (<i>entry level</i>) menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan
	EC6	Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di lokasi operasi yang signifikan
Dampak ekonomi tidak langsung	EC7	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan
	EC8	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak
Praktek pengadaan	EC9	Perbandingan dari pembelian pemasok lokal di operasional yang signifikan

Lanjutan Tabel 2.1

Kategori Lingkungan		
Bahan	EN1	Bahan yang digunakan berdasarkan berat atau volume
	EN2	Persentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang
Energi	EN3	Konsumsi energi dalam organisasi
	EN4	Konsumsi energi diluar organisasi
	EN5	Intensitas energi
	EN6	Pengurangan konsumsi energi
	EN7	Pengurangan kebutuhan energi pada produk dan jasa
Air	EN8	Total pengambilan air berdasarkan sumber
	EN9	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air
	EN10	Persentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali
Keanekaragaman hayati	EN11	Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola didalam, atau yang berdekatan dengan, Kawasan lindung dan Kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar
	EN12	Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati dikawasan lindung dan Kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar Kawasan lindung
	EN13	Habitat yang dilindungi dan dipulihkan
	EN14	Jumlah total spesies dalam iucn red list dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat ditempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat risiko kepunahan
	EN15	Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung (cakupan 1)
Emisi	EN16	Emisi gas rumah kaca (GRK) energi tidak langsung (cakupan 2)
	EN17	Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung lainnya (cakupan 3)
	EN18	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)
	EN19	Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK)
	EN20	Emisi bahan perusak ozon (BPO)
	EN21	NOX, SOX, dan emisi udara signifikan lainnya
	EN22	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan
	EN23	Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan
	EN24	Jumlah dan volume total tumpahan signifikan
	EN25	Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi basel 2 lampiran I, II, III, dan VIII yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah, dan persentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional
	EN26	Identitas, ukuran, status lindung, dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkait dampak dari pembuangan dan air limpasan dari organisasi
Produk dan Jasa	EN27	Tingkat mitigasi dampak terhadap lingkungan produk dan jasa

Lanjutan Tabel 2.1

	EN28	Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasi menurut kategori
Kepatuhan	EN29	Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpastian terhadap UU dan peraturan lingkungan
Transportasi	EN30	Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi dan pengangkutan tenaga kerja
Lain-lain	EN31	Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis
Asesmen pemasok atas lingkungan	EN32	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan
	EN33	Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensi dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
Mekanisme pengaduan masalah lingkungan	EN34	Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
Kategori Sosial Sub-Kategori : Praktek Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja		
Kepegawaian	LA1	Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan <i>turnover</i> karyawan menurut kelompok umur, gender, dan wilayah
	LA2	Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paruh waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan
	LA3	Tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan, menurut gender
Hubungan Industrial	LA4	Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama
Kesehatan dan Keselamatan Kerja	LA5	Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemen pekerja yang membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan kerja
	LA6	Jenis dan Tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang, dan kemangkiran, serta jumlah total kematian akibat kerja, menurut daerah dan gender
	LA7	Pekerja yang sering terkena atau beresiko tinggi terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka
	LA8	Topik Kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal dengan serikat pekerja
Pelatihan dan Pendidikan	LA9	Jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan menurut gender dan menurut kategori karyawan
	LA10	Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberlanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti
	LA11	Persentase karyawan yang menerima review kinerja dan pengembangan karier secara regular, menurut gender dan kategori karyawan
Keberagaman dan Kesenjangan Peluang	LA12	Komposisi badan tata Kelola dan pembagian karyawan per kategori karyawan menurut gender,

Lanjutan Tabel 2.1

		kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan indikator keberagaman lainnya
Kesetaraan Rumenerasi Perempuan dan Laki-Laki	LA13	Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi Perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan, berdasarkan lokasi operasional yang signifikan
Asesmen pemasok terkait praktik ketenagakerjaan	LA14	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaan
	LA15	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan dalam rantai pemasok dan tindakan yang diambil
	LA16	Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui pengaduan resmi
SUB KATEGORI : HAK ASASI MANUSIA		
Investasi	HR1	Jumlah total dan presentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia
	HR2	Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia terkait dengan aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasi, termasuk persentase karyawan yang dilatih
Non-diskriminasi	HR3	Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan korektif yang diambil
Kebebasan berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama	HR4	Operasi dan pemasok yang telah diidentifikasi mungkin melanggar atau berisiko tinggi melanggar hak untuk melaksanakan perjanjian bersama dan kebebasan berserikat serta tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut
Pekerja anak	HR5	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif
Pekerja paksa atau wajib kerja	HR6	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja
Hak Adat	HR7	Persentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia diorganisasi yang relevan
Praktik Pengamanan	HR8	Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil
Asesmen pemasok atas Hak Asasi Manusia	HR9	Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan review atau asesmen dampak hak asasi manusia (HAM)
	HR10	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia
	HR11	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pemasok dan tindakan yang diambil
Mekanisme pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia	HR12	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan formal

Lanjutan Tabel 2.1

SUB KATEGORI : MASYARAKAT		
Masyarakat Lokal	SO1	Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan program pengembangan yang diterapkan
	SO2	Operasi dengan dampak negatif actual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal
Anti Korupsi	SO3	Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi
	SO4	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi
	SO5	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil
Kebijakan Publik	SO6	Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima/penerima manfaat
Anti Persaingan	SO7	Jumlah total tindakan hukum terkait Anti Persaingan, anti-trust, serta praktik monopoli dan hasilnya
Kepatuhan	SO8	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap Undang
Asesmen pemasok atas dampak terhadap masyarakat	SO9	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria untuk dampak terhadap masyarakat
	SO10	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
Mekanisme Pengaduan Dampak Terhadap Masyarakat	SO11	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
SUB KATEGORI : TANGGUNG JAWAB ATAS PRODUK		
Kesehatan Keselamatan Pelanggan	PR1	Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan dampaknya terhadap Kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatan
	PR2	Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dampak Kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa sepanjang daur hidup, menurut jenis
Pelabelan Produk dan Jasa	PR3	Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, serta persentase kategori produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti persyaratan informasi sejenis
	PR4	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa
	PR5	Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan
Komunikasi pemasaran	PR6	Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan.
	PR7	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi, dan sponsor, menurut jenis hasil

Lanjutan Tabel 2.1

Privasi Pelanggan	PR8	Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan
Kepatuhan	PR9	Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap UU dan peraturan terkait penyediaan dan penggunaan produk dan jasa

GRI-G4 dirancang agar dapat diterapkan secara universal untuk semua organisasi, besar dan kecil, di seluruh dunia. Pengukuran dilakukan berdasarkan indeks pengungkapan masing-masing perusahaan yang dihitung melalui pembagian antara jumlah item yang diharapkan diungkapkan perusahaan, yang dirumuskan sebagai berikut (Wati, 2019):

$$CSRIj = \frac{\sum X_{ij}}{N_j} \quad (2.1)$$

Keterangan :

$CSRIj$ = *Corporate Social Responsibility Indeks* Perusahaan

N_j = Jumlah kriteria pengungkapan *Corporate Social Responsibility* untuk perusahaan j, $N_j \leq 91$

X_{ij} : 1 = Jika kriteria diungkapkan; 0 = Jika kriteria tidak diungkapkan

2.1.2. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan proporsi pemegang saham yang dimiliki oleh pemilik institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan lain kecuali anak perusahaan dan institusi lain yang punya hubungan istimewa seperti afiliasi dan asosiasi. Kepemilikan institusional yaitu kepemilikan suatu perusahaan yang sahamnya milik berbagai bentuk lembaga atau perusahaan lainnya, baik itu didalam maupun luar negeri. Kepemilikan ini difungsikan sebagai penjamin manajemen perusahaan yang memberikan kebijakan yang dapat mengoptimalkan pemegang saham lebih diuntungkan (Rustan, 2024).

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak institusi lain yaitu kepemilikan oleh perusahaan atau lembaga lain. Kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang terbentuk institusi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional merupakan suatu

alat yang dapat dipakai untuk mengurangi *agency conflict*. Kepemilikan institusional punya kendali bagi pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif. Jika tingkat kepemilikan institusional tinggi, maka akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional. Hal ini dapat menjadi penghalang bagi perilaku oportunistik oleh pihak manajer dan juga meminimalisir tingkat penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang dapat menurunkan nilai perusahaan (Rustan, 2024).

Perusahaan memberikan manfaat kepada pihak kepemilikan institusional dalam melakukan pengawasan secara maksimal terhadap kinerja pihak manajemen perusahaan. Dimana pihak kepemilikan institusional memiliki jumlah saham mayoritas karena sumber daya nya yang lebih besar dari pemegang saham lainnya. Karena dinilai menguasai atas saham mayoritas, maka pihak institusional dapat mengawasi kebijakan manajemen oleh suatu perusahaan dengan lebih intens dibanding pemegang saham lainnya. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional suatu perusahaan maka semakin meningkat juga tuntutan bagi manajer perusahaan melakukan tanggung jawab sosialnya. (Prasetyo, 2024).

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi atau lembaga keuangan yang mempunyai fungsi sebagai pengawas kinerja manajemen dalam meningkatkan nilai perusahaan, seperti asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusional lainnya. Kepemilikan institusional dapat diukur dengan cara menjumlahkan sahan yang dimiliki oleh institusional kemudian dibagi dengan jumlah sahan yang beredar. Investor institusional dianggap mampu menggunakan informasi laba periode sekarang untuk memprediksi laba di masa yang akan datang dibandingkan dengan investor non institusional. Selain itu, kepemilikan perusahaan oleh pihak luar juga memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi perusahaan melalui kritikan atau komentar yang semuanya dianggap publik atau masyarakat (Rustan, 2024).

Dalam konteks regulasi pasar modal Indonesia, kepemilikan institusional juga terkait dengan ketentuan pelaporan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap pihak yang memiliki paling sedikit 5% hak

suara, termasuk institusi seperti bank, perusahaan asuransi, dan lembaga investasi, wajib melaporkan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikannya kepada OJK. Kewajiban ini juga berlaku bagi anggota direksi dan komisaris yang memiliki saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga seluruh bentuk kepemilikan signifikan tercatat secara transparan (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Rumus untuk perhitungan Kepemilikan Institusional, sebagai berikut (Rustan, 2024) :

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham yang Dimiliki Institusi}}{\text{Total Saham Beredar}} \quad (2.2)$$

2.1.3. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan saham yang menjadi milik manajemen, baik itu komisaris maupun direksi, yang dicerminkan oleh banyaknya saham manajemen dalam pengambilan keputusan perusahaan. Jika terjadi suatu kondisi dimana terdapat kesalahan dalam penentuan keputusan, manajemen secara sadar maupun tidak sadar akan terdampak juga karena memiliki saham yang ditanamkan dalam perusahaan. Manajemen harus memiliki saham yang mayoritas ada agar dapat mengendalikan perusahaan dengan leluasa. Hal ini karena jika kedudukan manajemen menjadi pemilik saham secara bersamaan, maka hal ini juga dapat secara bersamaan bisa berusaha memperoleh kesejahteraan bagi pemilik (Rustan, 2024).

Kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen, baik sebagai direktur, maupun sebagai dewan komisaris yang ikut dalam setiap pengambilan keputusan di perusahaan secara aktif. Perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial berbeda dengan perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan manajerial. Perbedaannya adalah pada kualitas pengambilan keputusan oleh manajer seperti aktivitas yang dilakukan oleh manajer sekaligus bertindak sebagai pemegang saham (Rustan, 2024).

Kepemilikan manajerial merupakan suatu keadaan dimana manajer memiliki saham perusahaan atau manajer juga merupakan pemegang saham perusahaan. Kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajer perusahaan membuat manajer memiliki dua kepentingan dalam perusahaan yaitu sebagai pemilik dan juga sebagai pengelola perusahaan. Semakin besar kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan maka manajemen akan semakin proaktif dalam mengerjakan

tugas dan tanggung jawab nya di perusahaan tersebut dalam mewujudkan kepentingan pemegang saham dan akan meningkatkan kepercayaan publik sehingga nilai perusahaan juga akan naik (Maulana, 2024). Kepemilikan manajerial secara langsung berperan aktif dalam pengambilan keputusan. Dengan kata lain, manajer dan direksi perusahaan turut menjadi pemegang saham atas perusahaan tersebut, sehingga mereka memiliki kepentingan terhadap kinerja perusahaan (Lestari et al., 2022).

Perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial didalamnya, akan membuat manajer bertindak sebagai pemegang saham secara bersamaan. Hal ini dapat menyelaraskan kepentingannya dengan kepentingan perusahaan. Setiap keputusan yang diambil oleh manajer akan mempengaruhi kinerja perusahaan dan memberikan konsekuensi, baik itu konsekuensi positif maupun negatif bagi dirinya. Oleh karena itu, manajer tidak mungkin bertindak secara gegabah dan tanpa pemikiran matang dalam mengambil suatu keputusan (Rustan, 2024).

Kepemilikan saham oleh manajerial akan mempengaruhi kinerja manajemen dalam mengoptimalkan perusahaan. Hal ini dapat menjadi pengaruh yang positif terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan, contohnya direktur dan komisaris, yang bisa digambarkan sebagai hubungan antara agent dan principal. *Agent* diberi mandat oleh *principal* untuk menjalankan bisnis demi kepentingan principal. Manajer sebagai agent dan pemegang saham sebagai principal. Keputusan bisnis yang diambil manajer adalah keputusan untuk memaksimalkan sumber daya perusahaan (Rustan, 2024).

Berdasarkan POJK No. 4 Tahun 2024, anggota direksi dan komisaris yang memiliki saham perusahaan terbuka wajib melaporkan kepemilikan maupun setiap perubahan kepemilikannya tanpa memperhatikan besaran persentase kepemilikan. Selain itu, setiap pihak yang memiliki paling sedikit 5% hak suara juga diwajibkan melaporkan kepemilikan serta perubahannya kepada OJK. Kepemilikan manajerial dapat diukur sesuai dengan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan yang aktif ikut serta dalam pengambilan keputusan, dibagi dengan jumlah saham yang beredar (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Rumus untuk perhitungan Kepemilikan manajerial, sebagai berikut (Rustan, 2024) :

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah Saham yang Dimiliki Manajemen}}{\text{Total Saham Beredar}} \quad (2.3)$$

2.1.4. Komite Audit

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris. Komite audit merupakan salah satu organ perusahaan klien yang melaksanakan fungsi pengendalian intern. Tugas komite audit adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses laporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dark corporate governance di perusahaan-perusahaan. Komite audit dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab terhadap komisaris atau dewan pengawas. Ketua komite audit adalah anggota komisaris independen yang diangkat oleh komisaris. (Ardianingsih, 2018).

Komite audit yang efektif bekerja sebagai suatu alat untuk meningkatkan efektivitas, tanggung jawab, keterbukaan, dan objektivitas dewan komisaris, serta memiliki fungsi berikut ini (Ardianingsih, 2018) :

1. Memperbaiki mutu laporan keuangan dengan mengawasi laporan keuangan atas nama dewan komisaris.
2. Menciptakan iklim disiplin dan kontrol yang akan mengurangi kemungkinan penyelewengan-penyelewengan.
3. Memungkinkan anggota yang noneksekutif menyumbangkan suatu penilaian independen dan memainkan suatu peranan yang positif.
4. Membantu direktur keuangan dengan memberikan suatu kesempatan tempat pokok-pokok persoalan penting yang sulit dilaksanakan dapat dikemukakan.
5. Memperkuat posisi auditor eksternal dengan memberikan suatu saluran komunikasi terhadap pokok-pokok persoalan yang mem-perhatikan dengan efektif.
6. Memperkuat posisi auditor internal dengan memperkuat inde-pendensinya dari manajemen.

7. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelayakan dan objektivitas laporan keuangan, serta meningkatkan kepercayaan terhadap kontrol intern yang lebih baik.

Tujuan dibentuknya komite audit (Ardianingsih, 2018) :

1. Pelaporan keuangan

Direksi dan dewan komisaris memiliki tanggung jawab utama terhadap penyusunan laporan keuangan, sedangkan auditor eksternal bertanggung jawab atas hasil audit terhadap laporan tersebut. Dalam hal ini, komite audit berperan melakukan pengawasan secara independen terhadap seluruh proses penyusunan laporan keuangan dan kegiatan audit eksternal.

2. Manajemen risiko & kontrol

Komite audit memiliki fungsi untuk memberikan pengawasan independen terhadap penerapan manajemen risiko serta sistem pengendalian internal perusahaan, guna memastikan proses tersebut berjalan secara efektif dan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Tata kelola perusahaan

Komite audit juga bertugas memberikan pengawasan independen terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, sehingga seluruh aktivitas operasional perusahaan dapat berjalan secara transparan, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, disebutkan bahwa (Otoritas Jasa keuangan, 2015) :

1. Komite audit wajib dibentuk oleh perusahaan publik dan harus terdiri dari paling sedikit tiga anggota, termasuk di dalamnya seorang ketua komite audit.
2. Ketua komite audit wajib berasal dari komisaris independen perusahaan. Sementara anggota komite audit lainnya berasal dari pihak luar perusahaan yang memenuhi ketentuan independensi.
3. Anggota komite audit harus bersifat independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, maupun hubungan keluarga dengan direksi, komisaris, atau pemegang saham pengendali perusahaan. Independensi ini diperlukan agar komite audit dapat menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan profesional.

Komite audit didefinisikan sebagai pihak yang mendukung dewan komisaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, khususnya dalam fungsi pengawasan terhadap kinerja perusahaan dan pelaporan kepada para pemangku kepentingan. Keberadaan komite audit diharapkan dapat membantu dewan komisaris dalam mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan, serta meningkatkan kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Komite audit dipandang berperan dalam mendukung pengungkapan *Corporate Social Responsibility* melalui fungsi pengawasan yang lebih efektif, di mana semakin banyak jumlah anggota komite audit maka fungsi pengawasan terhadap seluruh aspek kinerja perusahaan semakin optimal, sehingga memudahkan pengendalian dan pemantauan manajemen puncak (Erawati & Sari, 2021).

Selain sebagai unsur pendukung dewan komisaris, komite audit juga diposisikan sebagai mekanisme tata kelola perusahaan yang berperan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh komite audit memungkinkan perusahaan untuk memastikan bahwa hasil audit yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mendorong manajemen untuk lebih transparan dalam mengungkapkan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan. Efektivitas komite audit tercermin dari jumlah anggotanya, karena semakin banyak anggota komite audit maka semakin baik pula pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen puncak (Erawati & Sari, 2021).

Kondisi tersebut dinilai mampu mendorong perusahaan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* secara lebih luas dalam laporan keuangan, sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi semakin meningkat. Komite audit dapat diukur berdasarkan jumlah anggota komite audit yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan, dengan asumsi bahwa jumlah anggota mencerminkan kekuatan fungsi pengawasan yang dimiliki komite audit tersebut (Erawati & Sari, 2021).

Rumus untuk perhitungan Komite audit, sebagai berikut (Erawati & Sari, 2021) :

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Anggota Komite Audit} \quad (2.4)$$

2.1.5. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah nilai yang memberitahukan besar kecilnya perusahaan. Terdapat banyak sekali proksi yang bisa dipakai untuk mewakili ukuran perusahaan yakni jumlah karyawan, total aktiva, nilai pasar saham, total penjualan, dan lain-lain yang semuanya berkorelasi tinggi. Ukuran perusahaan terbagi pada 3 kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium-size*), & perusahaan kecil (*small firm*) (Sudarno et al., 2022).

Ukuran perusahaan merupakan salah satu karakteristik perusahaan yang sangat penting. Ukuran perusahaan merupakan skala yang mengukur besar atau kecilnya suatu perusahaan yang dilihat dari total asset, total penjualan, kapitalisasi pasar, dan jumlah karyawan. Pengukuran ini digunakan untuk mengategorikan perusahaan menjadi kategori perusahaan besar, menengah, atau kecil. (Wati, 2019).

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan yang merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh para investor dalam melakukan investasi. Perusahaan yang lebih besar memiliki pengaruh yang lebih luas dikarenakan akan lebih banyak *stakeholders* yang mau berinvestasi. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka semakin baik pula sistem, teknologi, dan sumber daya yang dimiliki dalam mendukung aktivitas operasional. Kondisi tersebut memberikan kemudahan bagi manajemen dalam melakukan pengawasan, pengambilan keputusan, dan pengelolaan sumber daya perusahaan secara lebih efektif. Dengan dukungan sistem dan teknologi yang baik, perusahaan dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan lebih optimal, sehingga berpotensi meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan dan memperkuat daya saing di pasar. (Wati, 2019).

Perusahaan besar memiliki kecenderungan lebih besar untuk perataan laba. Perusahaan yang lebih besar mempunyai keinginan yang lebih besar untuk melakukan perataan laba dibandingkan perusahaan yang lebih kecil. Maka dari itu, perusahaan besar kemungkinan melakukan praktik perataan laba untuk mengurangi fluktuasi laba yang besar, fluktuasi laba yang besar menunjukkan risiko yang besarpula dalam investasi sehingga mempengaruhi kepercayaan investor terhadap perusahaan. Hal ini terjadi dikarenakan perusahaan besar memiliki pengawasan yang lebih ketat dari investor (Sudarno et al., 2022).

Karena itu, perusahaan besar kemungkinan melakukan praktik perataan laba guna mengurangi fluktuasi laba yang besar. Hal ini dilakukan karena fluktuasi laba yang besar menunjukkan risiko yang besar pula dalam investasi sehingga mempengaruhi kepercayaan investor terhadap perusahaan. Dengan itu, semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar kemungkinan manajemen untuk melakukan praktik perataan laba. Juga perusahaan besar lebih cenderung melakukan praktik perataan laba dibandingkan perusahaan kecil dikarenakan perusahaan besar dianggap memiliki prospek lebih luas untuk pengembangan usahanya dengan memiliki total aktiva yang besar dan lebih mudah dalam mendapat pendanaan dari pihak kreditur untuk menambah modal perusahaan (Sudarno et al., 2022).

UU No.20 Tahun 2008, mengelompokkan ukuran perusahaan ke dalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Pengelompokan ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut. UU No.20 Tahun 2008 tersebut mendefinisikan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sebagai berikut (Sudarno et al., 2022).

Kriteria Ukuran Perusahaan berdasarkan Jumlah Aset (Sudarno et al., 2022).

1. Usaha mikro

Usaha mikro merupakan kategori usaha dengan aset maksimal sebesar 50 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan), dengan penjualan tahunan tidak melebihi 300 juta rupiah.

2. Usaha kecil

Usaha kecil merupakan kategori usaha dengan aset lebih dari 50 juta hingga 500 juta rupiah, dengan penjualan tahunan lebih dari 300 juta hingga 2,5 miliar rupiah.

3. Usaha menengah

Usaha menengah merupakan kategori usaha dengan aset lebih dari 500 juta hingga 10 miliar rupiah, dengan penjualan tahunan 2,5 miliar hingga 50 miliar rupiah.

4. Usaha besar

Usaha besar merupakan kategori usaha dengan aset lebih dari 10 miliar, dengan penjualan tahunan lebih dari 50 miliar rupiah.

Besar kecilnya suatu perusahaan dapat diukur dari total aktiva, pendapatan atau modal perusahaan tersebut. Salah satu tolak ukur yang menunjukkan ukuran

perusahaan adalah ukuran aset perusahaan. Perusahaan dengan total aktiva yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan telah mencapai tahap kedewasaan, saat ini arus kas perusahaan positif, dan prospeknya bagus dalam periode yang relatif stabil, dan lebih menguntungkan daripada perusahaan dengan total aktiva rendah. Pengukuran ukuran perusahaan secara umum biasanya size diproksi dengan total aktiva (Sudarno et al., 2022).

Aktiva adalah aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaannya, salah satunya adalah untuk menghasilkan laba (Sudarno et al., 2022).

Rumus untuk perhitungan Ukuran perusahaan, sebagai berikut (Wati, 2019) :

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln (\text{Total Asset}) \quad (2.5)$$

2.1.6. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini menunjukkan tingkat efektivitas manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan, yang tercermin dari laba yang diperoleh melalui penjualan maupun pendapatan investasi. Secara umum, profitabilitas menggambarkan efisiensi perusahaan dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu memperoleh keuntungan secara maksimal (Kasmir, 2019).

Pengukuran profitabilitas dilakukan dengan membandingkan berbagai komponen dalam laporan keuangan, terutama neraca dan laporan laba rugi, serta dapat dievaluasi dalam beberapa periode operasi. Melalui pengukuran ini, perusahaan dapat melihat perkembangan kinerja keuangannya, mengidentifikasi penyebab perubahan laba, serta mengevaluasi apakah manajemen telah bekerja secara efektif. Keberhasilan atau kegagalan perusahaan dalam mencapai target laba juga menjadi dasar perencanaan di masa depan sekaligus bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajerial (Kasmir, 2019).

Rasio profitabilitas penting bagi perusahaan karena memberikan gambaran menyeluruh mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Melalui rasio ini, manajemen dapat menilai efektivitas strategi operasional, efisiensi penggunaan aset, dan keberhasilan keputusan investasi. Profitabilitas juga menjadi indikator utama kesehatan keuangan perusahaan, sehingga sangat membantu dalam

mengevaluasi apakah perusahaan telah mencapai target keuntungan yang telah ditetapkan (Kasmir, 2019).

Selain itu, hasil analisis profitabilitas berguna sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial untuk perencanaan masa depan, seperti penentuan strategi peningkatan laba, efisiensi biaya, atau evaluasi kinerja manajemen. Rasio ini juga berperan penting bagi pihak eksternal, seperti investor dan kreditur, karena menunjukkan tingkat pengembalian yang diharapkan serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, rasio profitabilitas menjadi salah satu alat utama dalam menilai keberlanjutan, daya saing, dan prospek pertumbuhan perusahaan (Kasmir, 2019).

Rasio profitabilitas juga memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu (Kasmir, 2019) :

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri

Sementara itu, manfaat yang diperoleh adalah untuk:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri

Salah satu rasio profitabilitas yang digunakan adalah *Return on Assets (ROA)*, yang menunjukkan seberapa efektif perusahaan menghasilkan laba bersih dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan seluruh aset yang dimilikinya untuk menghasilkan laba. Dengan membandingkan laba bersih terhadap total aset, *Return on Assets (ROA)* memberikan gambaran mengenai kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset secara keseluruhan tanpa memperhatikan bagaimana aset tersebut dibiayai (Brigham & Houston, 2019).

Return on Assets (ROA) merupakan perbandingan antara net income dengan total assets. Rasio ini menunjukkan tingkat pengembalian yang diperoleh perusahaan dari seluruh aset yang dikelola tanpa membedakan sumber pendanaannya. Dalam pembahasan rasio profitabilitas, *Return on Assets (ROA)* digunakan untuk menilai efektivitas manajemen dalam memanfaatkan aset perusahaan untuk menghasilkan laba. Nilai *Return on Assets (ROA)* yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih efisien dalam mengelola asetnya, sedangkan *Return on Assets (ROA)* yang rendah mengindikasikan bahwa aset yang dimiliki belum dimanfaatkan secara optimal dalam menghasilkan laba bersih (Brigham & Houston, 2019).

Rumus yang dapat digunakan adalah sebagai berikut (Brigham & Houston, 2019):

$$\text{Return on Assets (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \quad (2.6)$$

2.2. Review Penelitian Terdahulu

Adapun review dari penelitian terdahulu yaitu :

1. Zahroh, Hartono, Ainiyah, dan Nugroho (2023) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Institusional, *Leverage* dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Pemoderasi”. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, sedangkan variabel independennya meliputi kepemilikan institusional, leverage, dan ukuran dewan komisaris, dengan ukuran perusahaan sebagai variabel pemoderasi. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, sementara kepemilikan institusional dan leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, serta ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan variabel independen terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

2. Sibuea dan Arieftiara (2022) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Budaya Organisasi terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dengan Komite Audit sebagai Variabel Moderasi”. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, sedangkan variabel independennya meliputi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan budaya organisasi yang diukur melalui diversitas gender, dengan komite audit sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, sedangkan diversitas gender tidak berpengaruh. Selain itu, komite audit tidak dapat memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional, namun dapat memoderasi pengaruh diversitas gender terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
3. Sari dan Handini (2021) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Institusional dan Komite Audit terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*”. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, sedangkan variabel independennya meliputi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, sedangkan kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
4. Wijaya, Andriani, dan Martha (2024) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Manajerial, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial pada Perusahaan Infrastruktur”. Variabel

dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, sedangkan variabel independennya meliputi kepemilikan manajerial, leverage, dan ukuran perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, sementara kepemilikan manajerial dan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

5. Khoiriyah, Nurkhin, dan Andini (2022) melakukan penelitian dengan judul “*The Role of Audit Committee in Corporate Sustainability Disclosure*”. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, sedangkan variabel independennya meliputi karakteristik komite audit yang terdiri dari ukuran komite audit, keahlian keuangan anggota komite audit, dan jumlah pertemuan komite audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, sedangkan keahlian keuangan dan jumlah pertemuan komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
6. Afriyanti dan Luhglatno (2024) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Komite Audit terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan Manufaktur”. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, sedangkan variabel independennya meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, sedangkan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
7. Santo dan Rahayuningsih (2022) melakukan penelitian dengan judul “Karakteristik Perusahaan yang Mempengaruhi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*”. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, sedangkan variabel independennya meliputi ukuran perusahaan, tipe industri, ukuran dewan komisaris, kepemilikan institusional, kepemilikan publik, dan pertumbuhan perusahaan. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, tipe industri, dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, sedangkan ukuran dewan komisaris, kepemilikan publik, dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

8. Rukmana, Hendri, dan Rismansyah (2020) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia”. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, sedangkan variabel independennya meliputi profitabilitas dan ukuran perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan, baik secara parsial maupun simultan, tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
9. Mahalistianingsih dan Yuliandhari (2021) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Agresivitas Pajak, dan *Slack Resources* terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*”. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, sedangkan variabel independennya meliputi profitabilitas, agresivitas pajak, dan *slack resources*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, sedangkan agresivitas pajak dan *slack resources* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
10. Danduru, Susanto, Bandaso, Nuryadin, dan Andalia (2024) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Studi Empiris pada Perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016–2020)” meneliti pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan industri dasar dan kimia periode 2016–2020. Penelitian ini menemukan bahwa profitabilitas dan leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, sementara ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Penelitian terdahulu dapat disajikan dalam tabel 2.2 sebagai berikut

Tabel 2. 2 Review Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
Zahroh, Hartono, Ainiyah, & Nugroho (2023)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi.	Variabel dependen : Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> . Variabel independen : 1. Kepemilikan institusional 2. <i>Leverage</i> 3. Ukuran Dewan Komisaris Variabel moderasi : Ukuran Perusahaan	Secara Parsial : 1. Ukuran dewan komisaris berpengaruh secara positif signifikan terhadap <i>Corporate Social Responsibility</i> . 2. Kepemilikan institusional & <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> .
Sibuea & Arieftiara (2022)	Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Budaya Organisasi terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> dengan Komite Audit sebagai Variabel Moderasi	Variabel dependen : Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Variabel independen : 1. Kepemilikan institusional 2. Kepemilikan manajerial 3. Budaya organisasi (diversitas gender) Variabel moderasi : Komite audit	Secara Parsial : 1. Kepemilikan institusional berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> . 2. Kepemilikan manajerial berpengaruh secara negatif terhadap pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> . 3. Budaya organisasi (diversitas gender) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. 4. Komite audit tidak memoderasi pengaruh kepemilikan institusional & kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan <i>Corporate social Responsibility</i> . Secara Simultan : 1. Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, budaya organisasi (diversitas gender), & komite audit berpengaruh terhadap

Lanjutan tabel 2.2

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
			Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>
Sari & Handini (2021) (Sari & Handini, 2021)	Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> .	Variabel dependen : Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> . Variabel independen : 1. Kepemilikan manajerial 2. Kepemilikan Institusional 3. Komite audit	Secara Parsial : 1. Kepemilikan institusional & Komite audit berpengaruh secara positif signifikan terhadap pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> . 2. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR Secara Simultan : 1. Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional & Komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan CSR
Wijaya, Andriani, & Ng (2024) (Wijaya, Andriani, & Ng, 2024)	Pengaruh Kepemilikan manajerial, <i>Leverage</i> , dan Ukuran perusahaan terhadap pengungkapan Tanggung Jawab Sosial pada Perusahaan Infrastruktur	Variabel dependen : Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Variabel independen : 1. Kepemilikan manajerial 2. <i>Leverage</i> 3. Ukuran Perusahaan	Secara Parsial : 1. Ukuran perusahaan berpengaruh secara positif signifikan terhadap pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> 2. Kepemilikan manajerial & <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> .
Khoiriyah, Zarefar, Afifah, & Oktari (2022) (Khoiriyah, Zarefar, Afifah, & Oktari, 2022)	<i>The Role of Audit Commite in Corporate Sustainability Disclosure</i>	Variabel dependen : Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Variabel independen : 1. Kepemilikan manajerial 2. Ukuran dewan komisaris 3. Profitabilitas	Secara Parsial : 1. Kepemilikan institusional berpengaruh secara positif signifikan terhadap pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> . 2. Ukuran dewan komisaris berpengaruh secara positif signifikan terhadap pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> .

Lanjutan tabel 2.2

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
			3. Profitabilitas berpengaruh secara positif signifikan terhadap pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> . 4. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> . Secara Simultan : 1. Kepemilikan institusional, Kepemilikan manajerial, Ukuran dewan komisaris, dan Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> .
Afriyanti & Luhglatno (2024)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Komite Audit, terhadap Pengungkapan CSR Pada Perusahaan Manufaktur	Variabel dependen : Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> . Variabel independen : 1. Kepemilikan institusional 2. Kepemilikan manajerial 3. Komite audit	Secara Parsial : 1. Kepemilikan institusional & Kepemilikan manajerial berpengaruh secara negatif signifikan terhadap pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> . 2. Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> . Secara Simultan : 1. Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> .
Santo & Rahayuningsih (2022)	Karakteristik Perusahaan yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social	Variabel Dependen : Pengungkapan CSR	Secara Parsial : 1. Ukuran perusahaan, dan Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap

Lanjutan tabel 2.2

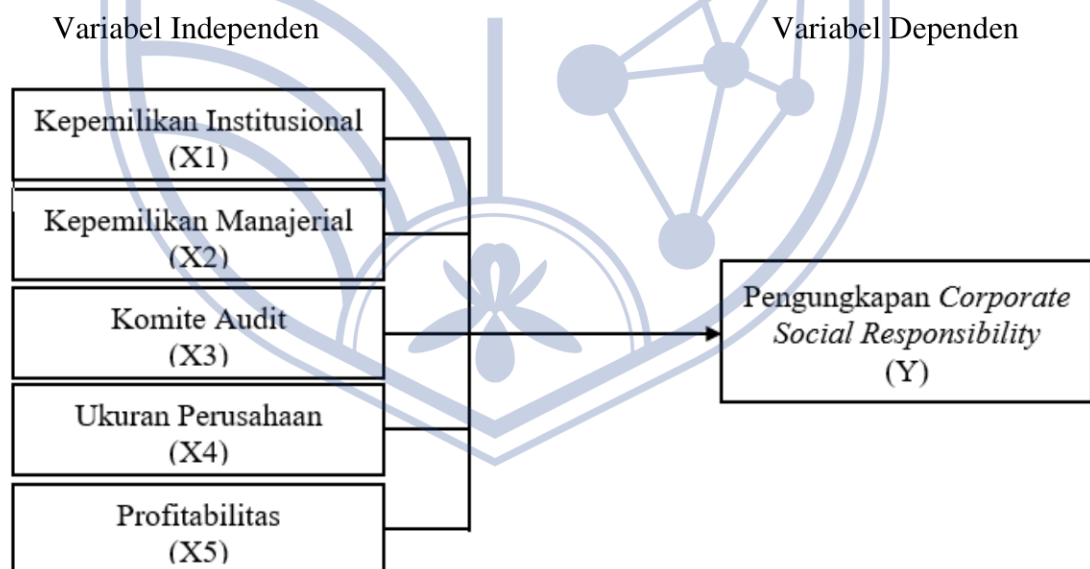
Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
(Santo & Rahayuningsih, 2022)	<i>Responsibility</i>	Variabel Independen : 1. Ukuran perusahaan 2. Profitabilitas 3. <u>Leverage</u>	pengungkapan <i>Corporate social Responsibility</i> . 2. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> . Secara Simultan : 1. Ukuran perusahaan, dan Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan <i>Corporate social Responsibility</i> .
Rukmana, Hendri, Rismansyah (2020) (Rukmana, Hendri, & Rismansyah, 2020)	Pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) pada Perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia	Variabel dependen : Pengungkapan CSR Variabel independen : 1. Profitabilitas 2. Ukuran perusahaan	Secara Parsial : 1. Profitabilitas & Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> . Secara Simultan : 1. Profitabilitas & Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> .
Mahalestianin gsih & Yuliandhari (2021) (Mahalistianin gsih & Yuliandhari, 2021)	Pengaruh Profitabilitas, Agresivitas Pajak, dan <i>Slack Resources</i> terhadap pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> .	Variabel dependen : Pengungkapan CSR Variabel Independen : 1. Profitabilitas 2. Agresivitas pajak 3. <i>Slack resources</i>	Secara Parsial : 1. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> . 2. Agresivitas pajak & <i>Slack resources</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR Secara Simultan : 1. Profitabilitas, agresivitas pajak, dan <i>slack resources</i> berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR

Lanjutan tabel 2.2

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
Danduru, Susanto, Bandaso Nuryadin, & Andalia (2024)	Pengaruh profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan CSR	Variabel Dependen : Pengungkapan CSR Variabel Independen 1. Profitabilitas 2. <i>Leverage</i> 3. Ukuran Perusahaan	Secara Parsial : 1. Profitabilitas, dan Ukuran perusahaan berpengaruh secara positif signifikan terhadap pengungkapan CSR. 2. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR Secara Simultan : 1. Profitabilitas, <i>Leverage</i> , & Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>

2.3. Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian yang telah ada dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual Secara Simultan

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Kepemilikan Institusional dapat meningkatkan fungsi pengawasan terhadap manajemen. Berdasarkan teori agensi, pengawasan yang lebih kuat mendorong perusahaan untuk meningkatkan transparansi, termasuk dalam pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Semakin tinggi kepemilikan institusional, semakin luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* karena meningkatnya pengawasan dan tuntutan transparansi perusahaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Afriyanti & Luhglatno, 2024).

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini yaitu :

H₁: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*

2.4.2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Kepemilikan manajerial dapat mengurangi konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham. Berdasarkan teori agensi, penyelarasan kepentingan tersebut mendorong manajemen untuk bertindak lebih bertanggung jawab, termasuk dalam pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Semakin besar kepemilikan manajerial, semakin luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* karena menurunnya konflik keagenan dan meningkatnya dorongan menjaga reputasi perusahaan (Sari & Handini, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini yaitu :

H₂: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*

2.4.3. Pengaruh Komite Audit Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Keberadaan Komite audit berperan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kinerja dan pelaporan perusahaan. Berdasarkan teori agensi,

pengawasan yang lebih kuat dapat mendorong manajemen untuk meningkatkan transparansi, termasuk dalam pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Semakin efektif komite audit, semakin luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* karena meningkatnya pengawasan dan transparansi perusahaan (Khoiriyah et al., 2022)

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini yaitu :

H₃: Komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*

2.4.4. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Ukuran perusahaan yang lebih besar cenderung menghadapi tekanan publik dan pengawasan yang lebih tinggi dimana perusahaan besar terdorong untuk meningkatkan transparansi dan tanggung jawab sosial guna mempertahankan legitimasi di mata masyarakat. Semakin besar perusahaan, semakin luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* karena tingginya sumber daya dan tekanan publik. (Santo & Rahayuningsih, 2022).

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini yaitu :

H₄: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Pada Perusahaan Subsektor Media dan Entertainment yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2025.

1.4.5. Pengaruh profitabilitas Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Profitabilitas yang tinggi mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aset yang dimiliki dimana perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar untuk melaksanakan dan mengungkapkan aktivitas *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang diukur menggunakan *Return on Assets (ROA)*, yaitu perbandingan laba bersih terhadap total aset. Semakin tinggi profitabilitas, semakin luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* karena meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas perusahaan (Mahalistianingsih & Yuliandhari, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini yaitu :

H₅: Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

